

APBD 2017

2017

PERPUB. KUTAI KARTANEGARA NO. 1, BD 2017/NO. 1, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Namun APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2017 masih dalam evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dikecualikan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib, dapat ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 16 Tahun 2010; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Perbup ini diatur mengenai pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai belanja yang bersifat tetap, mengikat dan wajib demi menjamin keberlangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang dimaksud antara lain berupa belanja pegawai, pelayanan jasa, keperluan kantor sehari-hari, pelayanan dasar masyarakat dan kewajiban kepada pihak ketiga. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPM kemudian diterbitkan SP2D. Sebelum melakukan pembayaran dalam rangka realisasi pengeluaran kas, wajib terlebih dahulu ditunjuk bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2017.